

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas berdasarkan Instruksi Presdien Nomor 12 Tahun 2011 belum terimplementasi dengan baik, hal ini didasari beberapa hal, yaitu:

- a) Dari hasil analisis mengenai produktivitas membuktikan bahwa produktivitas kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan program P4GN sudah sejalan dengan teori Agus Dwiyanto mengenai produktivitas.
- b) Jumlah sumber daya manusia yang ada di Badan narkotika Nasional Kabupaten Banyumas terkait masih kurang dari ideal dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas juga belum memadai, kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas tentunya menjadi hambatan dalam pelaksanaan program P4GN.
- c) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dalam melakukan upaya pelaksanaan P4GN mengenai responsivitas Pegawai BNNK Banyumas masih butuh perbaikan dalam menampung aspirasi masyarakat yang

dikarenakan karena keterbatasan sumber daya. Masyarakat sebagai salah satu acuan terhadap keberhasilan pelaksanaan P4GN belum sepenuhnya merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responsivitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas belum sejalan dengan teori Agus Dwiyanto.

- d) BNN Kabupaten Banyumas dalam menjalankan program sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas juga terus melakukan transparansi dan juga evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responsibilitas dalam pelaksanaan P4GN di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dapat dikatakan cukup baik dan sudah sejalan dengan teori Agus Dwiyanto. .
- e) Pada indikator akuntabilitas sudah sejalan dengan teori Agus Dwiyanto.hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan kegiatan utama dalam pelaksanaan P4GN pada setiap bidang di BNNK Banyumas yang berkaitan dengan tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, atau hasil yang telah dilakukan sudah dilakukan oleh setiap bidang di BNNK Banyumas.

5.2 Implikasi

- a) Pelaksanaan program P4GN di BNN Kabupaten Banyumas telah mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik, sesuai dengan teori Agus Dwiyanto. Ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sudah optimal

dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Hasil ini dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan strategi yang telah berjalan, serta mempertimbangkan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan produktivitas lebih lanjut.

- b) Karena BNN RI masih belum menyediakan sumber daya manusia dengan jumlah yang sesuai dengan Daftar Susunan Pegawai (DSP), BNNK Banyumas dapat menambah pegawai kontrak sesuai dengan DSP. Selain itu, klinik BNNK Banyumas harus memiliki Psikolog dan Fasilitator Rehabilitasi. Selain itu, Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang lebih besar dalam hal penganggaran dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan perlu terus melakukan peningkatan kapasitas institusi, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun teknologi.
- c) Responsivitas BNN Kabupaten Banyumas terhadap aspirasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat berdampak pada kepuasan masyarakat dan keberhasilan program secara keseluruhan. Perlu dilakukan perbaikan sistem layanan dan mekanisme pengaduan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani aspirasi masyarakat.
- d) Pelaksanaan program P4GN di BNN Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan SOP dan prinsip-prinsip akuntabilitas. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjalankan tugas dengan bertanggung jawab. Perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan sistem pengendalian internal dan mekanisme evaluasi untuk memastikan keberlanjutan praktik-praktik yang baik.

- e) BNN Kabupaten Banyumas telah memenuhi aspek akuntabilitas dalam pelaksanaan program P4GN. Ini menunjukkan adanya transparansi dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

